

Redesain Struktur Organisasi untuk Efektivitas Layanan Kesehatan Mental: Studi Kualitatif di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Sang Made Agus Wira Nugraha Yasa^{1*}, Thalia², H. Purwadhi³, Yani Restiani Widjaja⁴

Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, Indonesia

Email: asangmade@ymail.com, thalia.tin@gmail.com, purwadhi@ars.ac.id,
restianiwidjaja@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan teori struktur organisasi dalam konteks organisasi publik, dengan studi kasus yang difokuskan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana desain struktur organisasi, sistem distribusi wewenang, serta kekuasaan formal dan informal membentuk dinamika koordinasi dan memengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan jiwa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus intrinsik. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, observasi non-partisipatif, dan wawancara semi-struktural terhadap lima informan kunci yang mewakili berbagai tingkatan manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang masih bercorak birokrasi klasik dengan lima lapisan hierarki cenderung menghambat proses pengambilan keputusan dan menciptakan fragmentasi sistem kerja antarunit. Selain itu, temuan penting lainnya adalah dominasi kekuasaan informal yang kerap melemahkan jalur komando formal, sehingga mengganggu kohesi dan efektivitas organisasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan redesign struktur organisasi yang lebih adaptif, desentralistik, dan kolaboratif untuk meningkatkan kinerja pelayanan, khususnya dalam sektor kesehatan mental yang menuntut respons cepat dan pendekatan holistik. Temuan ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan teori organisasi publik, tetapi juga menjadi rujukan praktis dalam upaya reformasi kelembagaan di sektor layanan kesehatan jiwa di tingkat daerah maupun nasional.

Kata Kunci: struktur organisasi, rumah sakit jiwa, birokrasi publik, koordinasi layanan, redesign kelembagaan

ABSTRACT

This study aims to provide an in-depth analysis of the application of organizational structure theory within the context of public organizations, using a case study of the Provincial Mental Hospital of Bali. The research focuses on how organizational design, authority distribution systems, and both formal and informal power dynamics influence coordination effectiveness and the quality of mental health services. A qualitative descriptive approach with an intrinsic case study method was employed. Data were collected through document analysis, non-participant observation, and semi-structured interviews with five key informants from various managerial levels. The findings reveal that the organization's classical bureaucratic structure, characterized by five hierarchical layers, tends to hinder decision-making processes and cause fragmentation in inter-unit collaboration. Moreover, informal power dynamics were found to often override formal command lines, thereby disrupting organizational cohesion and reducing operational effectiveness. Based on these findings, the study recommends a redesign of the organizational structure to be more adaptive, decentralized, and collaborative, in order to improve service performance—particularly in the mental health sector, which demands rapid response and a holistic approach. These results not only offer theoretical contributions to the development of public organization theory but also serve as a practical reference

for institutional reform in mental health services at both local and national levels.

Keywords: organizational structure, mental hospital, public bureaucracy, service coordination, institutional redesign.

PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik memiliki kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan struktur internalnya. Dalam konteks rumah sakit jiwa, tantangan tidak hanya datang dari sisi medis, tetapi juga dari sistem manajerial dan struktur organisasi yang harus adaptif terhadap kebutuhan pasien dengan gangguan psikiatrik. Organisasi semacam ini tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan kerangka hukum, kebijakan pemerintah, serta ekspektasi publik (Devi & Nurjayanti, 2020; Ekasari & Agus, 2020; Rosdiana, 2018; Samudro et al., 2020).

Di Indonesia, fenomena kepadatan pasien, overlap peran, dan pelambatan pengambilan keputusan masih menjadi tantangan serius di banyak rumah sakit jiwa daerah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (2022), RSJ di beberapa provinsi menunjukkan beban layanan yang tinggi namun belum diimbangi oleh sistem organisasi yang efisien dan responsif. Di RSJ Provinsi Bali misalnya, meskipun terdapat struktur formal dan pembagian tugas yang jelas, pengambilan keputusan sering kali terhambat oleh prosedur birokratis dan koordinasi antarl lini yang tidak sinkron. Hal ini berdampak pada keterlambatan penanganan pasien, kurangnya sinergi lintas departemen, dan munculnya dominasi kekuasaan informal di tingkat menengah.

Teori klasik seperti birokrasi Max Weber (1947) memandang struktur organisasi sebagai sistem hierarki yang rasional dan legal-formal. Sementara itu, teori kontingensi Robbins & Judge (2023) menegaskan bahwa struktur yang paling efektif bergantung pada kesesuaian antara karakteristik organisasi dengan lingkungannya. Namun, dalam praktiknya, organisasi publik seperti rumah sakit jiwa sering kali mengalami *mismatch* antara teori dan realitas institusional yang mereka hadapi.

Organisasi publik memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari organisasi privat, terutama dalam hal akuntabilitas publik, keterikatan terhadap kebijakan negara, dan tekanan politis serta sosial (Denhardt & Denhardt, 2015; Imanuel Jaya, 2021; Puspitasari & Sudana, 2023; Sriram et al., 2019). Oleh karena itu, penelaahan terhadap struktur organisasi RSJ menjadi penting, tidak hanya untuk menilai efisiensi internal, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam upaya reformasi manajemen layanan kesehatan mental.

Dalam kerangka inilah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori struktur organisasi dalam konteks organisasi publik dengan studi kasus pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Fokusnya terletak pada bagaimana sistem wewenang, alur kekuasaan, dan pola koordinasi berdampak pada efektivitas pelayanan kesehatan jiwa. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini juga memberikan pemetaan empiris terhadap tantangan organisasi publik yang bersifat kompleks dan adaptif.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan teori struktur organisasi dalam konteks organisasi publik dengan studi kasus di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Fokus utama diarahkan pada bagaimana

desain struktur organisasi, distribusi wewenang, serta relasi kekuasaan formal dan informal memengaruhi efektivitas koordinasi dan pelayanan kesehatan jiwa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan model organisasi publik yang lebih adaptif serta memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan kelembagaan sektor kesehatan mental di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Bali melalui pengamatan dan interpretasi terhadap proses kerja serta pola hubungan kekuasaan dan wewenang yang berlangsung dalam kerangka organisasi publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara utuh dan kontekstual fenomena sosial-organisasional yang kompleks dan dinamis, seperti yang terjadi dalam sistem birokrasi rumah sakit jiwa. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk menelaah gejala sosial secara mendalam, karena peneliti menjadi instrumen kunci dalam proses pengumpulan data dan dapat menyesuaikan diri terhadap konteks lapangan.

Metode yang digunakan adalah studi kasus intrinsik, di mana fokus penelitian diarahkan secara spesifik pada satu objek institusi, yakni RSJ Provinsi Bali, dengan tujuan memahami karakteristik unik dan problematikanya secara mendalam. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali dinamika internal organisasi, terutama dalam aspek struktur formal, wewenang, sistem kerja, dan koordinasi lintas unit, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif namun sangat penting untuk pemahaman manajerial dan institusional. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

1. Dokumentasi, yang meliputi pengumpulan dokumen formal seperti struktur organisasi resmi RSJ, peraturan internal rumah sakit, serta dokumen kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi dasar operasional institusi ini.
2. Observasi non-partisipatif, dilakukan secara sistematis dengan mengamati alur kerja, jalur koordinasi, dan dinamika interaksi antarbagian tanpa melakukan intervensi langsung. Observasi ini berlangsung selama dua minggu dengan mencatat berbagai kendala dan efisiensi dalam praktik layanan rumah sakit.
3. Wawancara semi-terstruktur terhadap lima informan kunci yang dipilih secara purposif karena posisi strategis mereka dalam proses manajerial dan operasional rumah sakit. Teknik purposive sampling sesuai dengan pendekatan kualitatif, di mana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian (Ghozali, 2016).

Kelima informan tersebut diidentifikasi dengan menggunakan inisial untuk menjaga kerahasiaan, tetapi tetap diberikan deskripsi yang kaya agar pembaca dapat memahami latar belakang dan kontribusi masing-masing terhadap struktur organisasi rumah sakit.

1. Informan pertama (I1) merupakan seorang direktur rumah sakit yang telah menjabat selama lebih dari lima tahun. Ia memberikan pandangan strategis mengenai bagaimana struktur organisasi disusun berdasarkan regulasi nasional dan bagaimana pengambilan keputusan bersifat top-down serta terpusat pada tingkatan direktur. Ia juga menjelaskan adanya keterbatasan dalam mendelegasikan kewenangan karena kekhawatiran akan pelanggaran prosedur dan akuntabilitas birokratis.
2. Informan kedua (I2) adalah kepala bidang pelayanan medis yang menjabat lebih dari tujuh tahun, bertugas mengelola koordinasi antarunit rawat inap dan rawat jalan. Ia menyoroti adanya kesenjangan komunikasi antara manajemen dan lini operasional yang menyebabkan keterlambatan dalam alur layanan, terutama dalam kasus pasien gawat darurat dengan kebutuhan rujukan cepat.
3. Informan ketiga (I3) adalah kepala unit keperawatan yang mengatur jadwal kerja dan rotasi shift tenaga medis. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara struktur formal

yang terpusat dengan kebutuhan fleksibilitas dalam pengaturan sumber daya manusia. Ia menyampaikan bahwa pengambilan keputusan praktis di lapangan sering kali berbasis senioritas dan pengalaman, bukan pada jabatan formal.

4. Informan keempat (I4) adalah seorang staf administrasi senior di bagian rekam medis. Ia memberikan informasi mengenai alur dokumentasi dan koordinasi antarbagian, terutama dalam hal input dan pelaporan data pasien. Ia menilai bahwa sistem informasi manajemen rumah sakit belum terintegrasi dengan baik antarunit, menyebabkan redundansi dan tumpang tindih data.
5. Informan kelima (I5) adalah seorang pegawai front-office yang bertugas menerima pasien dan keluarga di bagian pendaftaran. Ia menjelaskan bagaimana sistem layanan awal masih sangat tergantung pada instruksi dari atasan, bahkan untuk keputusan-keputusan teknis sederhana, yang menurutnya memperlambat proses layanan.

Seluruh data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan pendekatan tematik interpretatif, yakni dengan mengidentifikasi pola-pola dan tema yang berulang dalam narasi informan serta membandingkannya dengan struktur organisasi formal yang ditelaah. Proses ini dilakukan melalui teknik coding manual dan sintesis naratif, yang bertujuan membangun pemahaman mendalam mengenai hubungan antara struktur formal, kekuasaan informal, dan efektivitas kerja organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi dan Hirarki Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Hasil temuan dari observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan lima informan kunci menunjukkan bahwa struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sangat dipengaruhi oleh pola birokrasi vertikal yang kaku, dengan lima tingkatan hierarki formal mulai dari Direktur Utama, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Unit, hingga Staf Teknis. Pola hierarki ini sejalan dengan model *machine bureaucracy* sebagaimana dikemukakan oleh Mintzberg (1979), di mana kendali terhadap pengambilan keputusan terpusat pada puncak struktur organisasi. Dalam praktiknya, sebagian besar keputusan strategis dan administrative termasuk alokasi sumber daya, rotasi tenaga medis, hingga penanganan kasus pasien khusus harus melalui persetujuan direktur atau wakil direktur, yang menyebabkan alur komunikasi dan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak responsif terhadap dinamika lapangan.

Fenomena ini mendukung temuan dari Robbins & Judge (2023) bahwa struktur organisasi dengan banyak lapisan hierarki cenderung menghadapi masalah dalam hal fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan. Bahkan, dalam wawancara dengan informan I1 dan I2, disebutkan bahwa inisiatif di level bawah sering kali terhambat karena tidak adanya pelimpahan kewenangan yang cukup. Struktur yang terlalu sentralistik seperti ini tidak hanya memperlambat alur komando, tetapi juga mengurangi ruang partisipatif bagi staf teknis dan operasional dalam mengambil keputusan taktis di lapangan.

Sistem Kerja dan Fragmentasi Lintas Unit

Temuan penting lainnya adalah adanya ketidakefisienan dalam sistem kerja antarunit, yang tampak dari minimnya koordinasi fungsional dan integrasi data. Observasi selama dua

minggu menunjukkan bahwa unit-unit di bawah RSJ cenderung bekerja secara silo, dengan minimnya forum kolaboratif antarunit yang memungkinkan pertukaran informasi secara real-time. Sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang seharusnya menjadi sarana utama dalam mengintegrasikan alur data medis dan administratif, belum digunakan secara maksimal. Beberapa unit seperti keuangan, rekam medis, dan pelayanan rawat jalan masih menggunakan format pelaporan manual atau semi-digital dengan format Excel yang tidak terintegrasi antarsistem.

Kondisi ini memperkuat temuan penelitian oleh Wibowo dan Tjahjono (2020), yang menyatakan bahwa fragmentasi struktur dan sistem kerja dalam rumah sakit pemerintah di Indonesia merupakan konsekuensi dari struktur birokrasi yang tidak responsif terhadap kebutuhan teknologi dan pengembangan sistem informasi. Dalam wawancara dengan informan I4 dan I5, muncul keluhan tentang tumpang tindih tugas serta ketidakjelasan alur pelaporan, terutama dalam hal koordinasi data pasien rujukan dan perhitungan kebutuhan layanan harian.

Wewenang Formal dan Dominasi Kekuasaan Informal

Walaupun RSJ telah menetapkan struktur formal yang jelas dalam bentuk organogram dan pembagian tugas masing-masing unit, namun dalam praktiknya, kekuasaan informal yang bersifat personalistik masih memainkan peran signifikan dalam pengambilan keputusan operasional. Seperti disampaikan oleh informan I3 dan I5, penugasan shift jaga, prioritas penggunaan ruang isolasi, hingga rotasi antarbagian kerap dipengaruhi oleh senioritas dan kedekatan personal dengan atasan, bukan berdasarkan mekanisme evaluasi kinerja atau rotasi terencana.

Hal ini menunjukkan bahwa selain struktur formal yang bersifat legal-rasional menurut Weber (1947), dalam organisasi publik sering kali berkembang kekuasaan informal yang bersifat karismatik atau tradisional, yang dapat memperlemah objektivitas dan akuntabilitas kerja. Dwiyanto (2006) menjelaskan bahwa dalam birokrasi Indonesia, terdapat budaya organisasi yang mengedepankan loyalitas personal dibandingkan profesionalisme, sehingga struktur yang tampak teratur secara formal, dalam praktiknya menjadi tidak efektif karena distorsi kekuasaan informal yang tidak tertulis.

Respons Informan terhadap Struktur dan Usulan Perubahan

Respons dari informan yang mewakili berbagai tingkatan manajerial dan operasional mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi struktural. Informan I2 dan I4 secara eksplisit menyarankan agar dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan teknis ke level menengah, seperti Kepala Bidang dan Kepala Unit, agar pengambilan keputusan harian tidak harus menunggu instruksi dari direktur. Selain itu, mereka juga menyarankan dibuatnya sistem komunikasi lintas-unit berbasis teknologi yang dapat mendeteksi hambatan koordinasi secara real-time.

Saran tersebut sejalan dengan gagasan New Public Service Denhardt & Denhardt (2015) yang menekankan pentingnya desentralisasi dan partisipasi dalam pengelolaan organisasi publik. Dalam konteks rumah sakit jiwa, desentralisasi tidak hanya berfungsi

sebagai efisiensi birokrasi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk merespons kebutuhan layanan pasien yang sangat dinamis dan kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan empiris dari observasi mendalam, analisis dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur dengan lima informan kunci di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur organisasi yang diterapkan masih sangat bercorak birokrasi klasik dengan karakteristik hierarki yang vertikal, sentralisasi kekuasaan pada pucuk pimpinan, serta prosedur administrasi yang panjang dan rigid. Struktur tersebut, meskipun secara normatif dirancang untuk menjaga akuntabilitas dan kendali atas proses kerja, dalam kenyataannya justru menjadi penghambat dalam menciptakan koordinasi yang lincah, pengambilan keputusan yang responsif, dan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan pasien dengan gangguan kejiwaan yang memerlukan penanganan cepat dan fleksibel. Sistem kerja yang terfragmentasi, minimnya integrasi sistem informasi lintas unit, serta ketergantungan terhadap kekuasaan informal yang muncul dari relasi personal, senioritas, dan budaya kerja konvensional semakin memperkuat bahwa tantangan utama bukan semata-mata pada struktur formal, melainkan pada ketidaksesuaian antara desain organisasi dengan dinamika lingkungan kerja dan tuntutan pelayanan publik berbasis responsivitas. Teori struktur organisasi yang dikemukakan oleh Robbins & Judge (2023) mengenai pentingnya kesesuaian antara bentuk struktur organisasi dengan karakteristik tugas dan lingkungan eksternal terbukti sangat relevan dalam konteks ini, mengingat bahwa rumah sakit jiwa memerlukan sistem manajerial yang mampu menyerap kompleksitas pelayanan kesehatan mental serta merespons kebutuhan pasien dengan pendekatan multidisipliner dan lintas fungsi. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam bentuk pemetaan permasalahan struktural yang menghambat efektivitas organisasi publik, tetapi juga memperkaya wacana teoritik mengenai bagaimana dominasi kekuasaan informal dan ketidakjelasan mekanisme koordinasi dapat mengganggu prinsip-prinsip organisasi rasional-legal sebagaimana yang diidealkan oleh teori birokrasi Weber. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih dalam bahwa perubahan struktur organisasi di sektor publik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata, melainkan harus menyentuh aspek budaya organisasi, perilaku manajerial, serta transformasi digital dalam pengelolaan sistem informasi rumah sakit.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan studi organisasi publik, khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan jiwa di institusi pemerintah. Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi pendekatan kontingensi dan teori institusional dalam menjelaskan ketidaksesuaian antara struktur organisasi yang bersifat birokratis dengan kebutuhan organisasi yang menghadapi dinamika tinggi seperti rumah sakit jiwa. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh struktur formal yang terdefinisi secara hierarkis, tetapi juga oleh kemampuan organisasi untuk membentuk sistem kerja yang adaptif, mendistribusikan wewenang secara proporsional, serta mengelola relasi kekuasaan informal secara bijak agar tidak mendistorsi tujuan pelayanan publik. Implikasi ini memperluas

pemahaman terhadap penerapan teori Mintzberg (1979) dan Weber (1947) dalam konteks layanan kesehatan mental, serta mengonfirmasi perlunya pendekatan multiteoritis yang menggabungkan struktur, budaya organisasi, dan tekanan institusional sebagai satu kesatuan dalam kerangka analisis organisasi publik.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan masukan strategis bagi pengelola rumah sakit jiwa di Indonesia, khususnya bagi manajemen RSJ Provinsi Bali, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem organisasi yang selama ini diterapkan. Temuan tentang lemahnya koordinasi antarunit, dominasi kekuasaan informal, dan sentralisasi pengambilan keputusan menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Implementasi rekomendasi seperti desentralisasi kewenangan, integrasi sistem informasi manajemen, serta pembentukan unit koordinasi lintas fungsi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat layanan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Dalam jangka panjang, perubahan tersebut dapat meningkatkan kepuasan pasien, memperkuat akuntabilitas publik, serta menjadikan rumah sakit jiwa sebagai institusi yang mampu bertransformasi mengikuti tuntutan zaman.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pemerintah daerah maupun Kementerian Kesehatan dalam menyusun pedoman pengelolaan rumah sakit jiwa berbasis tata kelola organisasi modern. Dengan memasukkan aspek struktur, sistem kerja, dan dinamika kekuasaan dalam perumusan kebijakan, maka intervensi pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menyentuh aspek strategis yang menentukan keberhasilan institusional. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga berimplikasi pada penguatan sistem pelayanan kesehatan jiwa nasional yang berkelanjutan, berbasis pada prinsip efisiensi organisasi, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik yang humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Devi, N. P., & Nurjayanti, W. (2020). Pengaruh Tata Ruang Bangsal Terhadap Perilaku Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 17(2). <https://doi.org/10.23917/Sinektika.V17i2.11564>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekasari, Y., & Agus, E. (2020). Peranan Rumah Sakit Jiwa Mahoni Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (Jisp)*, 1(1). <https://doi.org/10.30596/Jisp.V1i1.4375>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23 Edisi 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Immanuel Jaya. (2021). Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (Dari Paradigma Klasik Menuju Kontemporer). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 3(1). <https://doi.org/10.37304/Jispar.V3i1.371>
- Mintzberg, H. (1979). *The Structuring Of Organizations: A Synthesis Of The Research*. Prentice-Hall.
- Puspitasari, D., & Sudana, Y. K. Y. (2023). Evaluation Of Regional Economic Performance, Local Government Financial Performance, And Public Service Performance In The New

- Autonomous Region. *Asian Journal Of Management, Entrepreneurship And Social Science*, 3(03), 717–741.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2023). *Organizational Behavior* (19, Ed.). Person.
- Rosdiana, R. (2018). Identifikasi Peran Keluarga Penderita Dalam Upaya Penanganan Gangguan Jiwa Skizofrenia. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(2). <https://doi.org/10.30597/Mkmi.V14i2.3787>
- Samudro, B. L., Mustaqim, M. H., & Fuadi, F. (2020). Hubungan Peran Keluarga Terhadap Kesembuhan Pada Pasien Rawat Jalan Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh Tahun 2019. *Sel Jurnal Penelitian Kesehatan*, 7(2). <https://doi.org/10.22435/Sel.V7i2.4012>
- Sriram, N., Misomnai, C., Metasuttirat, J., & Rajphaetyakhom, C. (2019). A Comparative Analysis Of New Public Management New Public Service And New Public Governance. *Asian Political Science Review*, 3(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Weber, M. (1947). *The Theory Of Social And Economic Organization*. Free Press.
- Wibowo, A., & Tjahjono, H. (2020). Organizational Structure And Institutional Pressure: Evidence From Public Hospitals In Indonesia. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(1), 45–57.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)